

## DAFTAR PUSTAKA

- , 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 Ayat 1*. Republik Indonesia, Jakarta.
- , 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 Ayat 2*. Republik Indonesia, Jakarta.
- Ajis, Olvrias Tenisa, I Gede Sugiyanta dan Zulkarnain. 2013. “Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah pada Tingkat SMA di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2012”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*.
- Ammar, Faisyal dan Bustamam. 2019. “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol 4 (1), 116-130*.
- Dharma, Surya. 2010. *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori & Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frederik, Cindi Claudia. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) di Kota Manado. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik De La Salle.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Hariswati, Nurul. 2015. “Analisa Akuntabilitas dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS”. *Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ika, Artika. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar di Kecamatan Bulukerto. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Laila, Umi Nur. 2018. “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang”. *Skripsi*. Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/PMK/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2004. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mua, Briggita Vinny, Elsje Pauline Manginsela dan Jenny Baroleh. 2017. "Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah dari Anak Petani dan Non-Petani di Desa Sea dan Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa". *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Universitas Sam Ratulangi 13 (3A)*.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Maya Kesuma. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Perspektif Pendidikan dan Keguruan Vol VIII (1)*.
- Pratama, L. Jurhanie Isfan. 2016. "Analisis Pengaruh Good Governance Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah Dasar se-Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta)". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Presiden Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Rakhmawati, Ita. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1 (1).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & I)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Usnan. 2019. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)". *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Vol 5 (1)*, 83-95.
- Victoria, Tomi. 2014. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan". *Skripsi*. Pendidikan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wahinun, Mita Indah. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada MI Roudlotus Salam". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Majapahit.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.